

Peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Maharany, Hasrul, Al Rafni, Nurman S,
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Hasrul**
E-mail: hasrul@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa ampalu kota pariaman serta Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Ampalu Kota Pariaman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang untuk mendapatkan data hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dalam penelitian ini ialah menggunakan Teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan maka, peneliti memperoleh hasil penelitian bahwa peran yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Desa yaitu, pemberian motivasi terhadap masyarakat, melaksanakan koordinasi dan komunikasi, melakukan pengawasan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, memelihara hasil pembangunan desa. Kendala yang dihadapi Kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu, komunikasi, tingkat pendidikan, Sikap Individualisme yang dimiliki masyarakat.

Kata Kunci: kepala desa, partisipasi masyarakat, Pembangunan desa

ABSTRACT

This research aims to describe the role of the village head in increasing community participation in development in Ampalu Village, Pariaman City and Community Participation in Development in Ampalu Village, Pariaman City. This research is qualitative research with descriptive methods. There were 14 informants in this study to obtain research data. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation studies. Testing the validity of the data in this research uses source triangulation and method triangulation techniques. Based on the research conducted by the researchers, the researchers obtained research results that the role played by the Village Head in increasing Community Participation in Village development, namely, providing motivation to the community, carrying out coordination and communication, carrying out supervision. Forms of community participation in village development are planning, implementation, supervision, evaluation, maintaining village development results. The obstacles faced by the

village head in increasing community participation in village development are communication, level of education, and individualistic attitudes held by the community

Keywords: village head, community participation, village development



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2024 by author.

PENDAHULUAN

Dalam situasi pembangunan seperti sekarang ini, Pemerintah Indonesia telah merencanakan pembangunan nasional secara merata. Bukti dari dedikasi pemerintah terhadap pembangunan yang merata sudah terlihat sejak tahap terkecil dari struktur pemerintahan, yaitu di tingkat Pemerintahan Desa. Oleh sebab itu pembangunan ini memerlukan kerjasama yang kokoh antara semua sektor masyarakat dan pihak penyelenggara pemerintahan, yang telah mendapat mandat dari rakyat. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, merupakan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa.

Pemerintah Desa adalah bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan tugas administratif sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur. Posisi penting Desa dalam hierarki pemerintahan daerah membuatnya menjadi lembaga yang sering kali menjadi pusat perhatian masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan strategi layanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. (Mulyadi, 2019:125). Partisipasi masyarakat tidak hanya melibatkan kepala desa saja, tetapi juga mengharuskan kepala desa untuk bekerja sama dengan masyarakat dan berbagai organisasi lokal, seperti organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Organisasi-organisasi tersebut perlu benar-benar memperhatikan kegiatan pembangunan di desa, termasuk berpartisipasi dalam merencanakan melalui rapat Musrenbangdes yang disusun dengan pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom-up*).

Sejalan dengan itu, kepala desa Ampalu Kota Pariaman telah menerapkan beberapa program pembangunan desa yang berhasil dilaksanakan. Tujuan utama dari pembangunan desa ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta meningkatkan kualitas hidup penduduk. Namun, terdapat kendala dan kesulitan dalam melibatkan masyarakat desa untuk aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan partisipasi mereka dalam mendukung pembangunan desa.

Fenomena yang terjadi di Desa Ampalu terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan mencakup beberapa aspek. Pertama, terdapat gejala individualisme di kalangan masyarakat. Sikap acuh ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tingkat kesibukan yang tinggi di kalangan masyarakat. Tingkat kesibukan ini menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi, karena masyarakat lebih fokus pada pekerjaan mereka daripada mengikuti kegiatan rapat perencanaan pembangunan atau Musrenbang. Dengan demikian, kegiatan Musrenbang biasanya hanya dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan aparat pemerintah desa, sementara masyarakat yang memiliki kesibukan sendiri, seperti petani, nelayan, pemilik warung, dan lain sebagainya, sulit untuk berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan pembangunan atau perencanaan pembangunan tersebut.

Kedua, kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat merupakan isu lain yang muncul. Terkadang, masyarakat tidak mendapatkan informasi yang relevan mengenai aktivitas pembangunan yang sedang berlangsung. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang rencana pembangunan di Desa Ampalu. Penyebabnya bisa berasal dari aparat desa yang seharusnya bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat, namun mereka tidak melaksanakan tugas tersebut secara optimal. Serta Pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa masih kurang dan kurangnya kepedulian terhadap proyek-proyek pembangunan yang sedang dilakukan. Masyarakat memandang bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah semata, tanpa perlu campur tangan aktif dari masyarakat desa. Masyarakat desa belum sepenuhnya memahami esensi dari pembangunan desa itu sendiri. Oleh karena itu, fokus mereka lebih condong pada pekerjaan pribadi ketimbang ikut serta dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa atau Musrenbang. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Ampalu Kota Pariaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini berlokasi di di Desa Ampalu, yang terletak di Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan di Desa Ampalu Kota Pariaman. Pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui proses wawancara mendalam secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Jenis data sekunder ini mencakup berbagai dokumen seperti catatan lapangan, laporan, dan dokumen yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang dikumpulkan dari Desa Ampalu Kota Pariaman. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi. Pada penelitian ini Teknik pengujian keabsahan data ialah dengan Teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada empat, Pertama pengumpulan data, Kedua reduksi data, Ketiga penyajian data, dan Keempat verifikasi data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

Berdasarkan hasil penelitian peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Ampalu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 kepala Desa memiliki tugas yaitu menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Desa. Sesuai dengan undang-undang tersebut kepala Desa sebagai pemerintah Desa memiliki fungsi untuk memberikan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat salah satunya pelayanan pembangunan. Kepala Desa ampalu dalam melakukan perannya harus menjadi motor penggerak dari dirinya sendiri, bukan hanya sebagai figur yang memberikan perintah. Kepala Desa harus memberikan contoh yang nyata baik dalam kata-kata maupun tindakan sehingga masyarakat dapat terinspirasi untuk turut serta dalam upaya pembangunan.

Untuk memahami secara mendalam peran Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Memberikan Motivasi

Seorang Kepala Desa selaku pemimpin formal di desa harus mampu menggerakkan, mendorong dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, karena tujuan dari pembangunan itu tidak akan dapat terwujud apabila tidak ada keterlibatan masyarakat didalamnya. Dalam memberikan motivasi terlihat

memang benar adanya sebuah pembangunan desa sebelum direalisasikan, kepala desa memberikan motivasi dan pemahaman kepada masyarakat, dan pembangunan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Kemudian dalam memotivasi masyarakat untuk ikut dalam setiap kegiatan tidak lupa kepala desa memberikan semangat kepada masyarakat seperti menyediakan hidangan makanan dan minuman bagi masyarakat yang terlibat dalam proses kerja maupun gotong royong. Sehingga menjadi pendorong semangat masyarakat untuk andil dalam kegiatan pembangunan. Kemudian Kepala desa selalu mengusahakan untuk memulai dari dirinya sendiri, supaya menjadi contoh untuk masyarakatnya, seperti contoh ketika dalam kegiatan gotong royong di desa, Kepala Desa juga ikut serta membantu masyarakat. Sehingga nantinya akan timbul partisipasi dan kesadaran dari dalam diri masyarakat sendiri.

Motivasi adalah sebagai dorongan mental yang menggerakkan perilaku manusia atas dasar kebutuhan. Dalam motivasi, terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku individu. (Basrowi, 2014:65). Motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, oleh karena itu motivasi sering kali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. (Sutrisno, 2010:109). Sesuai dengan teori Kepuasan menyebutkan bahwa motivasi merupakan bahwa seseorang akan bertindak untuk dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Semakin tinggi standar kebutuhan dan kepuasan yang diinginkan, semakin giat orang itu bekerja. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor diri orang yang menguatkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilakunya. Teori ini mencoba menjawab pertanyaan kebutuhan apa yang memuaskan dan mendorong semangat bekerja seseorang.

Sesuai dengan teori motivasi diatas peran yang dilakukan Kepala desa Ampalu dalam memberikan motivasi sangat diperlukan dalam rangka menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desanya. Kepala Desa Ampalu memberikan motivasi untuk mencapai suatu tujuan agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai yang di harapkan. Dalam memberikan dorongan mental yang menggerakkan perilaku masyarakat, kepala desa memulai dari dirinya sendiri seperti ikut hadir dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan Pembangunan. Hal ini akan menjadi contoh untuk masyarakatnya, seperti contoh ketika dalam kegiatan gotong royong di desa, Kepala Desa juga ikut serta membantu masyarakat. Sehingga nantinya akan timbul partisipasi dan kesadaran dari dalam diri masyarakat sendiri. Terlihat kepala desa memberikan dorongan dan mengajak serta memberikan contoh agar masyarakat berperan aktif dalam pembangunan desa seperti dalam kegiatan Musrembang dan gotong royong desa.

b. Melaksanakan Koordinasi dan komunikasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dibutuhkan kerja sama antar lembaga maupun unsur desa terkait. Pemerintahan desa diwajibkan dan berwenang untuk mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, menjalin kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di desa. Untuk menyelaraskan hal tersebut, diperlukan komunikasi yang efektif antara Kepala Desa dan masyarakat agar program pembangunan dapat dipahami bersama dan menuju tujuan yang sama. Kriteria yang harus dimiliki Kepala Desa meliputi kemampuan mengomunikasikan program pembangunan secara konkret kepada masyarakat untuk memicu partisipasi dan mampu menjalin komunikasi yang baik dengan perangkat desa dan masyarakat.

Peran Kepala desa dalam koordinasi dan komunikasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Beberapa masyarakat masih minim akan pengetahuan pentingnya pembangunan dan partisipasi bagi masyarakat. Kemudian minim informasi untuk masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan rapat perencanaan pembangunan (musrembang). Masyarakat yang tidak hadir kurang mengetahui program pembangunan yang akan direncanakan dan untuk apa saja anggaran pembangunan digunakan, sehingga masyarakat kurang memahami apa tujuan dari pembangunan itu lakukan, dan apa pentingnya partisipasi masyarakat.

Menurut Thoha (2007:167), komunikasi merupakan proses dimana informasi atau berita disampaikan dan diterima dari satu individu ke individu lainnya. Pada teori yang dikemukakan oleh Rogers dan Kincaid (2005) mengemukakan, bahwa Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk/melakukan pertukaran informasi terhadap satu sama lain. Komunikasi menjadi cara untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, karena ketika kepala desa mampu berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat, maka pemahaman terhadap program pembangunan akan lebih cepat tersebar dan dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Kemudian Awaluddin Djamin (2011:86) menyatakan koordinasi diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi. Sesuai dengan teori koordinasi Kepala Desa Ampalu dalam melaksanakan pembangunan berkoordinasi terlebih dahulu dengan perangkat desa dan masyarakat. Tujuannya adalah memastikan keterlibatan semua pihak serta pemahaman yang jelas mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini bertujuan

untuk menjaga agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana dan mencegah terjadinya penyimpangan.

Komunikasi beberapa masyarakat masih minim akan pengetahuan pentingnya pembangunan dan partisipasi bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu diadakan sosialisasi akan pentingnya partisipasi dari pembangunan itu, supaya meningkatkan pengetahuan masyarakat akan partisipasi dalam pembangunan. Kemudian dalam hal koordinasi Kepala Desa perlu memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, mengarahkan, dan menyinkronkan berbagai program kegiatan pembangunan supaya masyarakat tidak salah menghartikan dari program pembangunan yang akan di laksanakan. Kepala desa harus memastikan keterlibatan semua pihak serta pemahaman yang jelas mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana dan mencegah terjadinya prasangka negatif dari masyarakat.

c. **Melakukan Pengawasan**

Kegiatan pengawasan juga merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Kepala Desa Ampalu telah melaksanakan pengawasan secara efektif. Sebagai contoh, Pengawasan secara langsung dilakukan dengan kehadiran Kepala Desa dalam setiap kegiatan pembangunan di desa, seperti hadir dalam mengawasi kegiatan pembangunan jalan rabat beton dan pembangunan irigasi. Kehadiran Kepala Desa ini bertujuan untuk mengamati dan mengawasi jalannya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakatnya, apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau belum. Kemudian pengawasan tidak langsung berupa laporan penggunaan dana pembangunan yang kemudian dijadikan Surat Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Pemerintah Kecamatan dan selanjutnya diteruskan ke Pemerintah Kota. Langkah ini diambil untuk mengawasi jalannya proyek pembangunan, memastikan bahwa rencana pembangunan dapat terlaksana dengan baik, dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana dalam pelaksanaannya. Jika ada sebuah kekurangan ataupun penyelewengan disitu Kepala Desa bertanggung jawab dalam meluruskan agar ketimpangan-ketimpangan itu tidak ada lagi.

Menurut Djati Julitriarsa dan John Suprihantoro (1998) pengawasan adalah tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk demikian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan kesalahan.

Teori pengawasan penutup Djati Julitriarsa disebut juga sebagai teori *conttrolling* yaitu pengawasan dan pengendalian yang menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya. Seperti yang dilakukan Kepala desa Ampalu dalam pengawasan mengusahakan hadir dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk sekedar melihat dan ikut membantu langsung serta memastikan apakah pembangunan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan yang diharapkan atau belum. Hal ini bertujuan sebagai *conttrolling* jalannya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Kepala Desa Ampalu telah melaksanakan pengawasan secara efektif. Misalnya Kepala Desa meminta laporan penggunaan dana pembangunan, memastikan bahwa rencana pembangunan dapat terlaksana dengan baik, dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana dalam pelaksanaannya.

Bentuk Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

a. Perencanaan

Dalam merencanakan pembangunan desa, kepala desa tidak bisa melakukannya dengan sendiri tetapi harus melibatkan semua elemen masyarakat maupun perangkat desa, kemudian kepala desa harus paham apa yang dibutuhkan ataupun diperlukan masyarakat. Partisipasi masyarakat Desa Ampalu dalam perencanaan masih kurang dilihat dari kehadiran partisipasi masyarakat dalam Musrembang. Hal ini karena kesibukan dalam mencari penghidupan, yang menyebabkan rendahnya partisipasi mereka dalam kegiatan tersebut. Kemudian beberapa masyarakat ada yang tidak mengetahui informasi mengenai kegiatan rapat perencanaan pembangunan. Perencanaan tidak bisa dilakukan oleh Kepala Desa sendiri tetapi juga harus melibatkan masyarakat, mulai dari perencanaan sampai tahap memelihara hasil pembangunan

Bintoro Tjokroaminoto mendefinisikan perencanaan sebagai proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan adalah proses komprehensif dalam merencanakan dan menentukan secara cermat langkah-langkah untuk masa depan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Siagian, 2003:88). Dalam teori perencanaan "theory of planning", perencanaan dapat dimaknai sebagai ide atau gagasan yang menjelaskan tentang upaya untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan. Seperti yang digambarkan di desa ampalu dalam bahwa kegiatan perencanaan merupakan salah satu kunci dari keberhasilan pembangunan di suatu daerah, seperti sebelum tahap pelaksanaan diadakan rapat yang dinamakan musrembang untuk pembentukan RKP (Rencana Kerja pemerintahan Desa Tahunan) dan RPJMDes. Setiap kegiatan atau program desa sudah dirancang selama 6 tahun di dalam RPJM. Kegiatan

perencanaan di desa Ampalu belum maksimal karena kurangnya kehadiran masyarakat desa ampalu. Hal ini juga disebabkan oleh kesibukan pekerjaan dari masyarakat yang mengakibatkan rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dan kurangnya informasi mengenai kegiatan rapat perencanaan pembangunan.

Oleh karena itu diperlukan peningkatan akses informasi guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Keterlibatan mereka dalam perencanaan pembangunan desa menjadi hal krusial dalam keseluruhan proses pembangunan. Keberhasilan dan pencapaian yang optimal memerlukan perencanaan yang matang, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam mendukung kesuksesan tersebut.

b. Pelaksanaan

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa yaitu dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik sangat diharapkan guna memberikan masukan kepada pemerintah daerah apa yang sebenarnya mereka butuhkan seperti sarana dan prasarana fisik perbaikan jalan rusak, jembatan, rumah ibadah (masjid) balai kampung/desa, irigasi. Kehadiran dan keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting karena mereka bukan hanya objek tetapi juga subjek dari proses pembangunan itu sendiri. Tanpa partisipasi mereka, pembangunan tidak akan terlaksana sebab mereka adalah bagian esensial dalam pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat Desa Ampalu dalam pembangunan dalam proyek irigasi sangat kolaboratif. Masyarakat aktif berpartisipasi secara gotong royong, memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemerintah desa dalam menyukseskan pembangunan tersebut. Pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dengan mengkomunikasikan siapa yang ingin berkontribusi dalam proyek pembangunan tersebut. Kepala Desa Ampalu mengungkapkan bahwa kontribusi tenaga dari masyarakat sangat penting kecuali untuk pekerjaan yang sangat mendesak atau tidak dapat dilakukan oleh masyarakat, mereka tidak akan diabaikan dalam pembangunan desa.

Menurut Nurdin Usman (2002:70) Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan merupakan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam bentuk materi, sumbangan pemikiran dan tindakan masyarakat terhadap pembangunan yang nantinya akan diaplikasikan dalam pelaksanaan maupun implementasi pembangunan. Sehubungan dengan itu sesuai dengan teori kapabilitas bahwa teori menekankan pentingnya memberikan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuan atau kapabilitas mereka sendiri. Dengan meningkatkan kapabilitas, masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih efektif dalam

pembangunan serta memiliki akses yang lebih baik dalam sumber daya. Setiap kegiatan pembangunan di desa diharapkan melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Maka dari itu partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ini merupakan elemen krusial dalam setiap langkah pembangunan desa. Kehadiran serta keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting karena mereka bukan hanya objek tetapi juga subjek dari proses pembangunan itu sendiri. Tanpa partisipasi mereka, pembangunan tidak akan terlaksana sebab mereka adalah bagian esensial dalam pelaksanaan pembangunan.

c. Pengawasan

Pengawasan adalah serangkaian observasi terhadap jalannya aktivitas suatu organisasi bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dalam konteks pembangunan desa, tanggung jawab pengawasan tidak hanya ada pada Kepala Desa dan perangkat pemerintah desa, tetapi juga melibatkan partisipasi seluruh warga desa dalam pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan di desa telah mencapai tingkat yang memadai karena semua pihak ikut andil. Masyarakat mempunyai kewajiban dan kesempatan yang sama untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat adalah memantau proyek-proyek pembangunan yang menggunakan dana bantuan dari Pemerintah Kota Pariaman. Jika terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek, hal tersebut akan dilaporkan kepada Kecamatan dan Pemerintah Kota Pariaman. Selain itu, masyarakat juga mengawasi penggunaan Dana Desa (ADD) yang dialokasikan untuk pembangunan.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Ampalu terbilang baik karena melibatkan partisipasi dari semua pihak. Kesadaran akan tanggung jawab dan kesempatan yang sama untuk melakukan tugas pengawasan sudah tersebar di seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai hasil pembangunan yang diharapkan, pentingnya kegiatan pengawasan oleh semua pihak, termasuk Kepala Desa dan seluruh masyarakat, sangat diperlukan. Kegiatan pengawasan sangat penting untuk dilakukan, hal ini mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang sedang berlangsung, sehingga hasil pembangunan tersebut akan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama.

d. Evaluasi

Kegiatan evaluasi menjadi sangat penting karena bertujuan untuk menilai sejauh mana kesesuaian pelaksanaan proyek dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Evaluasi juga membantu dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan dari kegiatan pembangunan tersebut. Jika terdapat kekurangan, evaluasi ini menjadi langkah untuk memperbaikinya agar hasilnya lebih optimal. Secara sederhana, evaluasi adalah proses untuk mengukur dan membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dengan yang telah tercapai.

Bentuk partisipasi masyarakat Desa Ampalu dalam kegiatan evaluasi seperti mengamati dan menilai hasil pembangunan yang dilakukan dan ketika terjadi permasalahan dalam pembangunan terlihat terdapatnya masukan dan laporan yang diberikan pada pelaksanaan pembangunan, masyarakat akan memberikan saran dan masukan serta kritikan yang disampaikan kepada pemerintah desa sebagai pelaksana pembangunan. Jika diperlukan tambahan biaya, pembahasannya akan diajukan melalui forum seperti rapat atau musyawarah dengan partisipasi masyarakat dan perangkat desa. Hal tersebut dibuktikan adanya masukan dan laporan yang diberikan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan, kemudian masyarakat sudah dapat menilai hasil dari pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Evaluasi merupakan aspek krusial yang terkait erat dengan pembangunan, dimana hal ini sangat penting untuk mengecek apakah pelaksanaan pembangunan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, di Desa Ampalu, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan tidak hanya terbatas pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Masyarakat juga bertanggung jawab terhadap hasil kerja yang telah dilakukan.

Jadi di dalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja agar pembangunan desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Pembangunan desa harus meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, dan harus langsung secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

e. Memelihara hasil pembangunan desa

Partisipasi masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan tercermin dari kondisi proyek pembangunan yang tetap terjaga, menunjukkan bahwa masyarakat turut serta dalam merawat dan memelihara segala hasil pembangunan di desa mereka dengan baik, bukan merusaknya. Masyarakat desa tidak hanya menggunakan hasil pembangunan, tetapi juga bertanggung jawab menjaga kelestariannya agar tetap bermanfaat bagi generasi mendatang.

Menjaga berarti turut serta dalam pemeliharaan agar tetap berfungsi atau terpelihara. Dalam konteks pembangunan, menjaga hasil pembangunan menjadi aspek penting yang harus dilakukan oleh semua pihak. Dengan demikian, hasil pembangunan dapat tetap terjaga dan terpelihara dengan baik, dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lebih panjang, dan jika terjadi kerusakan, perbaikan akan dilakukan.

Kendala-kendala kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

1. Komunikasi

Salah satu kendala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kurangnya komunikasi. Sebabnya, gagasan, kebijakan, dan rencana pembangunan hanya akan mendapat dukungan jika dipahami dan disadari bahwa hal-hal tersebut mencerminkan sebagian atau keseluruhan kepentingan dan inspirasi dari masyarakat. Komunikasi, menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada pertukaran pesan di antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat agar pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami. Sementara menurut Thoha (2006:167), komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang kepada orang lain.

Komunikasi yang dilakukan dalam pembangunan di desa Ampalu untuk mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi sudah dilakukan dengan baik tetapi terdapat kendala dari masyarakat dimana kurangnya pemahaman mengenai manfaat partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu sendiri. Maka dari itu diperlukan sosialisasi akan pentingnya partisipasi dari pembangunan supaya masyarakat paham apa manfaat partisipasi dalam perencanaan pembangunan.

2. Tingkat Pendidikan

Sebagian besar penduduk Desa Ampalu memiliki latar belakang pendidikan hanya hingga SMP dan SMA. Tingkat pendidikan yang rendah ini menjadi hambatan dalam menyampaikan informasi terkait program pembangunan kepada masyarakat. Mereka mungkin kurang tanggap dan lambat memahami informasi yang disampaikan, terutama saat menjelaskan maksud dan tujuan dari rencana pembangunan. Di sisi lain, masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih cepat dalam pemahaman. Namun, ada juga hambatan terkait partisipasi mereka dalam bentuk tenaga kasar karena pertimbangan gengsi. Mereka cenderung lebih suka memberikan saran atau kritik tanpa terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, masyarakat yang pendidikannya rendah memiliki semangat dalam pelaksanaan, tetapi terbatas dalam memberikan ide, gagasan, atau kritik.

3. Sikap Individualisme

Sikap individualisme masyarakat desa merupakan dampak dari bergesernya budaya masyarakat. Budaya masyarakat yang dulunya

saling bekerja dan bergotong royong, akan tetapi beberapa masyarakat desa ampalu lebih mementingkan kepentingan sendiri, seperti kepentingan bekerja untuk kehidupan masing-masing. Dimana masyarakat desa bermata pencaharian sebagai nelayan, petani dan berdagang sehingga kesibukan tadi menjadi salah satu kendala dalam partisipasi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai kolaborasi, edukasi tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran dan manfaat jangka panjang dari partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat lebih terbuka akytif dan mau berpartisipasi dalam mendukung pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sebagai pemimpin, peran kepala desa sangat krusial dalam membangkitkan, menggerakkan, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan seorang Kepala Desa yang memiliki kecakapan, integritas, kearifan, serta pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola pemerintahan desa, didukung oleh staf desa yang berkualitas. Bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat Desa Ampalu dalam proses pembangunan, tahapannya mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemeliharaan hasil pembangunan. Dalam perencanaan masyarakat tingkat partisipasi masyarakat Desa Ampalu belum dikatan maksimal seperti beberapa masyarakat belum berpartisipasi dalam memenuhi undangan Rapat Musrembang Desa Ampalu. Hal ini dikarenakan kesibukan masyarakat dan mengetahui informasi mengenai kegiatan rapat perencanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan masyarakat sudah cukup baik dimana masyarakat desa bersemangat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan termasuk masalah komunikasi, tingkat pendidikan, dan sikap individualisme yang dimiliki oleh Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S., Biyatmoko, D., Mahyudin, I., & Indrayatie, E. R. HUBUNGAN KARAKTERISTIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PESERTA BANK SAMPAH. *EnviroScienteeae*, 17(2), 151-158.
- Kumala, H. R., & Agustina, T. (2018). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bogor. *II* (1).
- Mustanir, A. (2017). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di kelurahan kanyuara kecamatan watang sidenreng kabupaten sidenreng rapping. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 247-261.

- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga.
- Pamuji, K., Nasihuddin, A. A., Ardhanariswari, R., & Supriyanto, S. (2017, November). Pengembangan Model Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Banjarpanepen Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. In *Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed* (Vol. 7, No. 1).
- Siagian, S. P. (2000). *Administrasi pembangunan: konsep, dimensi, dan strateginya*. Bumi Aksara.
- Sukmana, E., & Islamy, H. (2019). Peranan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 95-109.
- Thoha, M. (2007). Perilaku organisasi konsep dasar dan aplikasinya. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa